



Contents lists available at Journal IICET

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Konsep PAN-islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia

Novi Zahra^{*)}, Fatimah Fatimah

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 22th, 2023

Revised Feb 19th, 2023

Accepted Mar 29th, 2023

Keyword:

PAN-islamisme
Jamaluddin Al-Afghani
Partai politik

ABSTRAK

Jamaluddin menciptakan beberapa ide di bidang politik untuk membuat umat Islam bangkit dan bersatu melawan kolonialisme, diantaranya yaitu Pan-Islamisme, Partai Nasional dan Pemerintahan Republik, ide tentang modernitas, dan tidak ada pemisahan antara agama dengan politik. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui konsep PAN-Islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, keinginan untuk menegakkan politik yang berbau syari'at Islam telah menjadi sebagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di negeri ini. Tidak heran ketika dari kalangan Islam lahir partai-partai politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya partai-partai politik Islam di Indonesia. Salah satunya karena faktor sosiologis yang mana umat Islam sebagai kaum mayoritas di Indonesia memerlukan wadah untuk berorganisasi. Karena itulah gagasan Pan-Islamisme dijadikan peninggalan warisan pemikiran oleh tokoh Indonesia. Konsep Pan-Islamisme dalam perkembangan partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa gagasan ini sangat berpengaruh karena menimbulkan wadah organisasi politik bernafaskan Islam di Indonesia.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Zahra, N.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: novizahra71@gmail.com

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwasanya peradaban Islam mulai tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad hingga mencapai puncaknya ketika masa Bani Abbasiyah. Usaha Nabi untuk mempersatukan umatnya tidaklah mudah, hal ini dikarenakan mereka terdiri dari berbagai suku dan ras yang berbeda. Hal ini kemudian diteruskan oleh generasi selanjutnya seperti sahabat, tabi'in dan seterusnya. Di samping terjadi perkembangan yang signifikan, akan tetapi perselisihan pendapat antar golongan tidak dapat dihindarkan (Khalik, 2014).

Jika melihat kembali ke sejarah awal perkembangan Islam, maka dapat dilihat bahwa perselisihan pendapat sudah terjadi. Misalnya perlawanan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap pemerintahan Ali, yang kemudian Muawiyah pula disingkirkan oleh Bani Abbasiyah hingga seterusnya (Sakinah, 2013). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada abad ke-9 hingga abad ke 14 umat Islam mengalami abad keemasan pada masa khalifah al-Ma'mun. Hal ini ditandai dengan berkembangnya beberapa disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, dan tasawuf. Selain itu didukung pula dengan kegiatan penerjemahan kitab yang disambut baik oleh masyarakat muslim kala itu. Akan tetapi kejayaan Islam mulai terusik dengan adanya serangan dari Mongol.

Hingga pada abad ke-18 Mesir jatuh ke tangan Barat (*Napoleon Bonaparte*) (Bistara, 2021). Pada saat itu juga Barat mulai mendominasi kekuatannya di negara-negara Islam. Barat juga memasukkan paham baru yang menyedatkan, seperti mengatakan bahwa Tuhan dalam Islam itu pemaksa dari manusia yang menyembahnya (Taufik, 2015).

Adapun dalam hal ini, peneliti fokus pada salah satu tokoh pembaharu Mesir yaitu Jamaluddin al-Afghani karena memiliki julukan Bapak Nasionalis. Selain itu, tokoh ini juga memiliki pendapat bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan semua zaman dan kondisi. Apabila terjadi pertentangan antara ajaran agama dengan kondisi di masyarakat, maka perlu adanya interpretasi baru seperti yang termaktub didalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, jalan dari interpretasi tersebut adalah dengan adanya jalan jihad dan ijtihad untuk mengembalikan kejayaan umat Islam (Maryam, 2015). Jamaludin Al-Afghani adalah pembaharu muslim pertama yang menggunakan term Islam dan Barat sebagai dua fenomena yang selalu bertentangan. Sebuah pertentangan yang justru harus dijadikan patokan berpikir kaum muslim, yaitu untuk membebaskan kaum muslim dari ketakutan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Faktor itulah yang menyebabkan gerakan Pan Islamisme dijadikan peninggalan warisan pemikiran pembaharuan yang cukup banyak dan bernilai bagi kaum muslimin. Bentuk relevansi Pan Islamisme yang ada di Indonesia pemikiran pembaharuan dalam segi sosial politik dapat di rumuskan seperti berikut: komunisme, adalah hasil khayalan dan imaginasi yahudi, yang telah bercampur aduk dengan kebatilan. Ia adalah strategi barat yang telah lama kehilangan esensi pandangan tentang kebenaran-kebenaran sentral (Hasriadi, 2014).

Jamaluddin dikenal sebagai tokoh pembaharu politik sekaligus modernis Islam pada abad ke-19. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang anti imperialis. Untuk mengobarkan semangat jihadnya, Jamaluddin menciptakan beberapa ide di bidang politik untuk membuat umat Islam bangkit dan bersatu melawan kolonialisme barat dan pemerintah yang absolut, di antaranya yaitu:

1. PAN-Islamisme; merupakan sebuah gerakan untuk menyatukan solidaritas umat Islam. PAN-Islamisme memperluas penanaman rasa nasionalisme dan membangkitkan semangat persatuan umat Islam. Gagasan ini mengajarkan seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu dan membebaskan diri dari perbudakan asing. PAN-Islamisme bukan hanya bertujuan untuk keagamaan tetapi juga untuk kemajuan nasional guna melawan kolonialisme barat dan pemerintah yang absolut.
2. Partai Nasional dan Pemerintahan Republik; sistem pemerintahan yang paling tepat menurut Jamaluddin adalah sistem pemerintahan republik. Sebab, pemerintahan otoriter tidak jauh berbeda dengan tirani. Dapat dilihat dengan mudahnya imperialisme barat menguasai serta mengintervensi sistem pemerintahan. Jamaluddin menganjurkan pembentukan "*Pemerintahan Rakyat*". Ia banyak berbicara tentang keharusan pembentukan dewan perwakilan yang disusun sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat, dan anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang betul-betul dipilih oleh rakyat, sebab dia berkeyakinan bahwa suatu dewan perwakilan yang dibentuk atas perintah raja atau kepala negara, atau atas anjuran penguasa asing, maka lembaga tersebut akan lebih merupakan alat politik bagi yang membentuknya. Gerakan politik yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani yaitu menyebarkan ide Pan-Islamisme di dunia Islam. Untuk mencapai ide ini, pada tahun 1879 atas usaha Jamaluddin, terbentuklah Partai Nasional (*Al-Hizb al-Wathani*) di Mesir, tujuan partai tersebut antara lain memperjuangkan pendidikan universal, menyelenggarakan kebebasan pers, memasukkan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi bidang militer dan sebagainya. Gerakan ini pada tahun 1838M telah membangkitkan semangat umat Islam dalam menggalang persatuan dan kesatuan dalam menentang penjajahan bangsa Barat.
3. Ide tentang modernitas; Kalau dipahami secara seksama tentang penyebab kemunduran umat Islam selama ini adalah munculnya sikap fatalisme di kalangan umat, yang menyebabkan terjadinya pembatasan kreativitas, sehingga ide-ide kreatif tidak lagi muncul dari umat Islam. Semua ini mendorong terjadinya ketertinggalan, kemiskinan dan kebodohan umat Islam itu sendiri. Dimana membuat mereka dapat dikuasai dan dipermainkan oleh negara-negara Barat modern, yang sangat menghargai akal dan cara berfikir rasional serta prinsip hukum kualitas. Selain itu pemahaman terhadap ajaran Islam yang kurang tepat, juga merupakan faktor penyebab kemunduran umat Islam selama ini. Untuk mengatasi semua persoalan ini, Jamaludin Al-Afghani mengeluarkan kebijakan sebagai berikut: 1) Dasar modernitas umat Islam harus bercermin pada nilai suci Al-Qur'an dan hadis, sebagai doktrin asli guna mengeliminir kekurangan internal umat Islam; 2) Melenyapkan paham fatalis dan menggantikannya dengan paham rasionalis; dan 3) Tehnik dan strategi

penerapannya harus mengacu kepada sains dan teknologi Barat Modern. Kemudian mempelajari rahasia kekuatan mereka, guna menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan modernitas dalam Islam.

4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik; hal ini dikarenakan Jamaluddin melihat sebab-sebab kemunduran yang bersifat politik, misalnya pemerintahan yang absolut, perpecahan umat Islam, mempercayakan kekuasaan kepada orang yang tidak dapat dipercayai, menyerahkan administrasi negara kepada orang yang tidak berkompeten dan intervensi asing. Maka dari itu, Jamaluddin menganggap bahwa semua itu harus diubah dan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Karena politik harus bersandar kepada ajaran moral, dan ajaran moral harus bersandar kepada ajaran tauhid. (Akmal Hawi, 2017).

Melihat kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dan berada di bawah penindasan imperialisme bangsa-bangsa barat, Jamaluddin Al-Afghani menggerakkan solidaritas sesama muslim dalam satu ikatan agama, bukan ikatan suku maupun ras. Di mana seorang penguasa muslim akan diterima oleh suku maupun bangsa lain yang seagama selama masih menegakkan hukum Islam, dari manapun ia berasal. Ia juga menekankan bahwa pemimpin adalah orang yang dipilih dari orang-orang yang paling taat agamanya, bukan dipilih lantaran pewarisan, kehebatan suku maupun kekayaan materialnya, melainkan harus disepakati oleh anggota masyarakatnya. Inilah ide Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian dikenal sebagai Pan-Islamisme (Sukmalia, 2019). PAN-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bukanlah meleburkan kerajaan-kerajaan dan Negara-negara muslim menjadi satu, melainkan menyatukan mereka dalam satu ide dan kerjasama yang saling memperkuat dengan prinsip berpegang teguh pada pedoman ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Nurtina, 2019), yang mana dengan persatuan tersebut, kemudian bersama-sama bangkit untuk melawan penjajahan.

Seperti negara lain yang sedang memperjuangkan hak kemerdekaannya dari penjajah, Indonesia juga mengalami gerakan pembaharuan yang tidak berangkat dari ruang hampa. Gerakan reformasi ini diilhami dari tokoh reformis yang berhaluan modern di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Mengutip dari pendapat Deliar Noer dan Zuhri, bahwasanya pergerakan yang terjadi di Mesir sangat diperhatikan oleh para pemimpin Indonesia pada permulaan abad ke-20. Adapun gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebangkitan nasional di Indonesia.

Adapun pengaruh pemikiran Jamaluddin terhadap tokoh reformis Islam Indonesia, Ahmad Dahlan ialah usaha-usaha untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar dan menghilangkan taqlid, bid'ah dan khurafat, menyucikan batin dan mengembangkan akhlak yang baik serta mengembangkan musyawarah dengan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu ide Pan-Islamisme yang telah dikemukakan oleh al-Afghani membentuk organisasi Sarekat Islam pada tahun 1912 di mana organisasi tersebut merupakan pergerakan untuk melawan dan menentang penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia demi mempertahankan kepentingan ekonomi umat muslim (Zain, 2015). Adapun fakta sejarah yang panjang mengemukakan bahwa adanya keinginan untuk menegakkan syari'at Islam, baik melalui perjuangan fisik, jalur konstitusi yang legal maupun melalui hak politik dengan menentang dan melawan pemerintahan yang sah telah menjadi bagian dari cerita perjuangan umat Islam Indonesia. Meski demikian dalam realitas sosial politik, gagasan tersebut tidak pernah bisa mendapat dukungan secara penuh dari mayoritas penduduk sehingga muncul kembali partai-partai politik islam di era reformasi.

Ada 4 faktor yang menjadi penyebab partai-partai Islam tersebut bermunculan kembali, antara lain: Pertama, faktor teologis yang mana berhubungan dengan pemikiran bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan politik maupun negara dalam kehidupan. Kedua, faktor sosiologis yang mana umat muslim sebagai kaum mayoritas di Indonesia memerlukan wadah untuk berorganisasi. Ketiga, faktor historis yang mana dalam sejarah masa lalu partai Islam telah hadir dan ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat, faktor reformasi yang mana demokratisasi dan kebebasan menjadi acuan setiap kelompok masyarakat untuk mendirikan dan membentuk partai politik (Alam, 2018).

Faktor itulah yang menyebabkan gerakan Pan Islamisme dijadikan peninggalan warisan pemikiran pembaharuan yang cukup banyak dan bernilai bagi kaum muslimin. Bentuk relevansi Pan Islamisme yang ada di Indonesia pemikiran pembaharuan dalam segi sosial politik dapat di rumuskan seperti berikut: komunisme, adalah hasil khayalan dan imaginasi yahudi, yang telah bercampur aduk dengan kebatilan. Ia adalah strategi barat yang telah lama kehilangan esensi pandangan tentang kebenaran-kebenaran sentral. Ia juga merupakan musuh yang sangat besar bagi agama, budaya dan sains. Kapitalisme, betapapun pandainya ia memikat hati rakyat, namun hatinya sendiri gelap, jiwanya lumpuh, dan suaranya bisu. Kapitalisme adalah musuh besar manusia. Dikalangan umat Islam amat diperlukan disiplin ilmu politik, yang didasari dengan asas

permusyawaratan Islam dalam bentuk perwakilan pemerintah. Kemunduran umat Islam yang bersifat politis di sebabkan adanya perpecahan dikalangan kaum muslim sendiri dan selalu mempercayakan kepemimpinan pada orang-orang yang memang tidak patut untuk di percaya, dan juga suka mengabaikan masalah-masalah kemiliteran, para administratornya pun tidak pula profesional.

Jamaluddin terus membakar semangat jihad umat Islam dengan tujuan agar mereka bangkit dan bersatu melawan orang-orang yang telah menghina mereka, baik secara tertulis maupun tidak. Ia membuat umat Islam sadar dan membangunkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu dalam Pan-Islamisme. Jamaluddin percaya bahwa jika Islam dipahami dan dipraktikkan dengan benar dapat membawa umatnya ke perbebasan mereka dari sikap otoriter penguasa dan kolonialisme asing. Dari berbagai aspek yang ada, peneliti menemukan hasil dari permasalahan bahwasannya Pan-Islamisme ini mempunyai keterkaitan di Indonesia, ide-ide pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dalam perspektif politik Islam secara tidak langsung ditransformasikan oleh pengikut-pengikutnya. Dapat dikatakan bahwa gerakan Islam di abad ke-20 banyak terpengaruh dan menjadikannya sumber inspirasi. Inti dari Pan-Islamisme ini adalah menurut Jamaluddin bahwa Islam ada;ah satu-satunya kekuatan untuk kesejahteraan umat. Dan jika ikatan tersebut diperkuat dan dijadikan sebagai sumber kehidupan maka hasilnya adalah kekuatan solidaritas yang akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan negara yang kuat dan seimbang.

Konsep tersebut terlihat dalam tokoh dan gerakan-gerakan Islam modern masa kini seperti Hasan al-Banna dengan Ikhwan Muslimin, Abdul A'la al-Maududi dengan Jana'atul Islam dan termasuk Muh Natsir dengan masyuminya dan gerakan ini juga ditransformasikan oleh tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam penyebaran Pan-Islamisme di Indonesia yaitu: Syeikh Taher Jalaludin, Kaum muda di Sumatera, Syeikh Ahmad Soorkati, K. H. A. Dahlan, Ahmad Hasan, gerakan tersebut membangkitkan suatu pergerakan nasional di Indonesia, terutama di dalam organisasi Al-Jam'iyat Al-Khairiyah (1906), Sarekat Islam (1911), Muhamaddiyah (1912), Ikatan pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Islam (MUI), Lembaga Dakwah Islam di Indonesia (LDII), Front Pembela Islam (FPI), adanya pergerakan PAN-Islamisme tersebut menjadikan para tokoh-tokoh Islam terinspirasi oleh pergerakan tersebut, relevansi dari PAN-Islamisme itu sendiri mendorong kesadaran dan bernegara dengan mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan, dan berpedoman pada ideologi negara yaitu berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya penegasan judul ini peneliti menemukan bahwa gerakan PAN-Islamisme dalam politik Islam tersebut ternyata ada relevansinya di Indonesia, melihat dari aspek-aspek yang ada bahwa PAN-Islamisme berkontribusi di Indonesia yaitu dapat di lihat bahwa Indonesia yang berpegang teguh terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang sama-sama menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berlandaskan Islam, mensejahterakan bangsa dan negara untuk selalu bangkit dan bersemangat dalam melawan ketertinggalan dan penjajahan dari negara asing, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi negara untuk maju dan selalu menjadikan pemimpin yang beriman Islam, dan pada intinya menyatukan umat Islam untuk selalu bepegang teguh terhadap dirinya dan agamanya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui konsep PAN-Islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) (Sugiyono, 2016). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku atau karya-karya yang bersangkutan untuk menyelidiki hasil karya orang lain dengan topik yang diteliti (Sugiyono, 2017). Adapun keterbaruan dari penelitian ini adalah memfokuskan pada bagaimana relevansi dari konsep Pan-Islamisme terhadap perkembangan partai politik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Jamaluddin berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya (Qadir, 2015). Ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis. Sebab-sebab lain lagi adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, lemahnya persaudaraan antara umat Islam dan lain-lain. Untuk mengatasi semua hal itu menurut pendapatnya umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlaq, berkorban untuk kepentingan umat, pemerintah otokratis harus diubah menjadi demokratis, dan persatuan umat Islam harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai dengan tuntutan zaman. Ia juga menganjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum, yang tujuan akhirnya untuk memperkuat dunia Islam secara politis dalam menghadapi dominasi dunia barat. Ia berpendapat tidak ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal/ilmu pengetahuan, atau

dengan kata lain Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan (Sjadzali, 1995). Selanjutnya bagaimana ide-ide pembaharuan dan pemikiran Politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan akan diuraikan berikut ini :

1. Bentuk Negara dan Pemerintahan

Menurut Jamaluddin, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik. Sebab, di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar (Maryam M. , 2014). Pendapat seperti ini baru dalam sejarah politik Islam yang selama ini pemikirnya hanya mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut. Pendapat ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran barat, sebab barat lebih dahulu mengenal pemerintahan republik, meskipun pemahaman Jamaluddin tidak lepas terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Kemunculan ide Jamaluddin tersebut sebagai reaksi kepada salah satu sebab kemunduran politis yaitu pemerintah absolut.

2. Sistem Demokrasi

Di dalam pemerintahan yang absolut dan otokratis tidak ada kebebasan berpendapat, kebebasan hanya ada pada raja/kepala negara untuk bertindak yang tidak diatur oleh Undang-undang. Karena itu Jamaluddin menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan dengan corak pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokratis merupakan salah satu identitas yang paling khas dari pemerintahan yang berbentuk republik. Demokrasi adalah pasangan pemerintahan republik sebagaimana berkembang di barat dan diterapkan oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki sebagai ganti pemerintahan khalifah. Dalam pemerintahan negara yang demokratis, kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berpengalaman, karena pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali dan syura diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar dapat dipraktekkan dalam berbagai urusan. Selanjutnya ia berpendapat pemerintahan otokrasi yang cenderung meniadakan hak-hak individu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghargai hak-hak individu. Maka pemerintahan otokrasi harus diganti dengan pemerintahan yang bercorak demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu.

Menurut Jamaluddin, pemerintahan yang demokrasi menghendaki adanya majelis perwakilan rakyat. Lembaga ini bertugas memberikan usul dan pendapat kepada pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan negara. Urgensi lembaga ini untuk menghindari agar tidak muncul pemerintahan yang absolut. Ide atau usul para wakil rakyat yang berpengalaman merupakan sumbangan yang berharga bagi pemerintah. Karena itu para wakil rakyat harus yang berpengetahuan dan berwawasan luas serta bermoral baik. Wakil-wakil rakyat yang demikian membawa dampak positif terhadap pemerintah sehingga akan melahirkan undang-undang dan peraturan atau keputusan yang baik bagi rakyat. Selanjutnya, para pemegang kekuasaan haruslah orang-orang yang paling taat kepada undang-undang. Kekuasaan yang diperoleh tidak lantaran kehebatan suku, ras, kekuatan material dan kekayaan. Baginya kekuasaan itu harus diperoleh melalui pemilihan dan disepakati oleh rakyat. Dengan demikian orang yang terpilih memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kekuasaan itu. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa sumber kekuasaan menurut Jamaluddin adalah rakyat, karena dalam pemerintahan republik, kekuasaan atau kedaulatan rakyat terlembaga dalam perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat.

3. PAN-Islamisme

Jamaluddin menginginkan adanya persatuan umat Islam baik yang sudah merdeka maupun masih jajahan. Gagasannya ini terkenal dengan PAN Islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam dalam masalah keagamaan, kerjasama antara kepala negara Islam. Kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggungjawab bersama dari tiap negara terhadap umat Islam dimana saja mereka berada, dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas serta mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Kesatuan benar-benar menjadi tema pokok pada tulisan Jamaluddin. Ia menginginkan agar umat Islam harus mengatasi perbedaan doktrin dan kebiasaan permusuhan.

Perbedaan sekte tidak perlu menjadi hambatan dalam politik, dan kaum muslimin harus mengambil pelajaran dari contoh Jerman, yang kehilangan kesatuan nasionalnya karena terlalu memandang penting perbedaan agama. Bahkan perbedaan besar dalam doktrin wilayah teluk, antara sunni dan syi'ah, dapat dijumpai sehingga ia menyerukan kepada bangsa Persia dan Afghan supaya bersatu, meskipun yang pertama adalah syi'ah dan yang kedua adalah bukan, dan selama masa-masa akhir hidupnya ia melontarkan ide rekonsiliasi umum dari kedua sekte tersebut. Meskipun semua ide Jamaluddin bertujuan untuk mempersatukan umat Islam guna menanggulangi penetrasi barat dan kekuasaan Turki Usmani yang dipandangnyanya menyimpang dari Islam, tapi ide PAN Islamnya itu tidak jelas.

Apakah bentuk-bentuk kerjasama tersebut dalam rangka mempersatukan umat Islam dalam bentuk asosiasi, atau bentuk federasi yang dipimpin oleh seseorang atau badan yang mengkoordinasi kerjasama

tersebut, dan atau seperti negara persemakmuran di bawah negara Inggris. Sebab ia mengetahui adanya kepala negara di setiap negara Islam. Pan-Islamismenya Jamaluddin itu adalah suatu asosiasi antar negara-negara Islam dan umat Islam di wilayah jajahan untuk menentang kezaliman interen, para pengusaha muslim yang lalim, menentang kolonialisme dan imperialisme barat serta mewujudkan keadilan. Jamaluddin menekankan solidaritas sesama muslim karena ikatan agama, bukan ikatan teknik atau rasial (Sadzali, 1993).

Seorang penguasa muslim entah dari bangsa mana datangnya, walau pada mulanya kecil, akan berkembang dan diterima oleh suku dan bangsa lain seagama selagi ia masih menegakkan hukum agama. Penguasa itu hendaknya dipilih dari orang-orang yang paling taat dalam agamanya, bukan karena pewarisan, kehebatan sukunya atau kekayaan materialnya, dan disepakati oleh anggota masyarakatnya. Inilah ide pemikir orisinal yang merupakan solidaritas umat yang dikenal dengan Pan-Islamisme atau Al-Jamiah al-Islamiyah (Persaudaraan sesama umat Islam sedunia).

Namun usaha Jamaldduin tentang Pan-Islamismenya ini tidak berhasil, konsep Pan Islamisme yang diseruhkan oleh Jamaluddin adalah dalam rangka memudahkan bangsa-bangsa Muslim melepaskan diri dari kendali asing (Noorthaibah, 2015). Jamaluddin menempatkan posisi yang pas menggunakan ukhuwah Islamiyah dan iman kepada Al-Qur'an dalam menjembatani perbedaan mazhab suni-syah, serta meminimalisir konflik kepentingan antar sultan. Awalnya Jamaluddin menginginkan kekhalifan terpadu, kesatuan kekuasaan umat muslim, namun karena adanya perbedaan pandangan dengan Khalifah Turki Usmani yaitu Khalifah Abdul Majid, sehinggalah Jamaluddin mengalihkan keinginannya kepada kesatuan jiwa (*The World Spirit*) yang nantinya disebut nasionalisme agama disamping nasionalisme tanah air.

Keseluruhan keterangan di atas mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwasanya konsep pemikiran Jamaluddin bermula dari perjalanan panjang dalam menyerukan perubahan diberbagai negeri Islam, yang umumnya mempunyai permasalahan umum, yaitu mengalami penjajahan, keterbelakangan pendidikan serta dekadensi aqidah. Awalnya Jamaluddin memperjuangkan nasionalisme tanah air (bersifat kedaerahan) kemudian berubah menjadi PAN Islamisme (Jamia Islamiyah) yang berasaskan pada kesatuan politik dan kekuasaan, namun akhirnya Pan Ismiyah ditujukan pada nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air.

4. Relevansi PAN-Islamisme di Indonesia

Persoalan Islam dan Negara merupakan persoalan ijthadiyah karena itu pertimbangannya senantiasa merujuk pada perkembangan sosial dan budaya yang berkembang dan sah bila mana terjadi perbedaan pemikiran dan implementasinya dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga kelompok yang berbeda ini sama-sama berusaha merespon tantangan sistem politik dan pemerintahan Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme dan sebagainya, serta nilai-nilai dasar yang melatarinya seperti persamaan Di Indonesia, keinginan untuk menegakkan syari'at Islam, baik melalui jalur politik dan konstitusi yang legal maupun melalui perjuangan fisik dengan menentang pemerintah yang sah telah menjadi sebagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di negeri ini (Haedar, 2016).

Namun demikian kenyataan sosial politik menunjukkan bahwa gagasan semacam itu tidak pernah mendapat dukungan mayoritas penduduk. Pada era reformasi muncul kembali partai politik yang berasas Islam (partai Islam). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan kembali partai- partai Islam tersebut. Pertama, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. Kedua, faktor sosiologis di mana umat Islam Indonesia mayoritas sehingga perlu adanya wadah untuk mereka. Ketiga, faktor historis di mana keberadaan partai Islam tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu di mana partai Islam telah ada dan ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Ke-empat, faktor reformasi yang melahirkan kebebasan dan demokratisasi di mana setiap golongan dan kelompok dibuka peluang untuk membentuk/mendirikan partai politik. Namun kemunculan kembali partai politik Islam tersebut mengalami per-pecahan atau fragmentasi di mana partai Islam yang dibentuk atau berdiri begitu banyak (dalam bahasa AM Fatwa, satu Islam banyak partai). Tampaknya sifat fragmentasi ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kekuatan-kekuatan Islam di Indonesia semenjak zaman perjuangan dulu. Oleh karena itu tidak heran ketika dari kalangan Islam modernis lahir partai-partai politik seperti PBB, PUI, Masyumi Baru dan Partai Islam Masyumi (serta PAN yang tidak berdasarkan asas Islam tetapi nasionalis-religius). Sedangkan dari ka-langan tradisionalis lahir partai politik seperti PKU dan PNU (di samping PKB yang tidak berdasarkan pada asas Islam namun nasionalis-religius). Sementara dari rahim Sarekat Islam, telah lahir partai politik seperti PSII dan PSII 1905.

Hal ini karena di samping jumlah partai politik Islam yang banyak juga karena faktor elite- elite politik Islam yang mendirikan partai politik yang berorientasi nasionalis-religius dan pluralis, seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut mempunyai basis yang kuat dan besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain itu juga, di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka lebih melihat substansi

Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam. Argumentasi tersebut di atas semakin mendapat justifikasi, terlihat dari menurunnya dukungan umat Islam terhadap PPP dan PBB, padahal kedua partai ini mengusung syari'at Islam dalam perjuangannya. Sementara itu, PKS meski sebagai partai Islam tidak mengusung tema-tema Islam yang membuat orang takut tetapi pada tema-tema yang selama ini menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, penegakan keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, dapat dikatakan, tema-tema yang bersifat keagamaan tampaknya kurang menarik lagi bagi pemilih Islam, sebaliknya menginginkan tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat selama ini.

Simpulan

Bahaya kolonialisme barat menjadi yang paling penting dalam pemikiran sosial-politik Jamaluddin. Menurutny, perilaku menyimpang para penguasa muslim saat itu yang sangat absolut menyebabkan Islam mundur dan semakin membuat barat berkuasa di wilayah Islam. Oleh karena itu, Jamaluddin menciptakan beberapa ide di bidang politik untuk membuat umat Islam bangkit dan bersatu melawan kolonialisme, diantaranya yaitu Pan-Islamisme, Partai Nasional dan Pemerintahan Republik, ide tentang modernitas, dan tidak ada pemisahan antara agama dengan politik.

Di Indonesia, keinginan untuk menegakkan syari'at Islam, baik melalui jalur politik dan konstitusi yang legal maupun melalui perjuangan fisik dengan menentang pemerintah yang sah telah menjadi sebagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di negari ini. Oleh karena itu tidak heran ketika dari kalangan Islam modernis lahir partai-partai politik seperti PBB, PUI, Masyumi Baru dan Partai Islam Masyumi (serta PAN yang tidak berdasarkan asas Islam tetapi nasionalis-religius). Sementara dari rahim Sarekat Islam, telah lahir partai politik seperti PSII dan PSII 1905. Hal ini karena di samping jumlah partai politik Islam yang banyak juga karena faktor elite-elite politik Islam yang mendirikan partai politik yang berorientasi nasionalis-religius dan pluralis, seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut mempunyai basis yang kuat dan besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain itu juga, di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka lebih melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam.

Referensi

- Abu Tholib Khalik, (2014). *Gelombang Reformasi Pemikiran dalam Islam*, ed. Revisi. Bandar Lampung, pd Hidayat
- Alam, D. M. (2018). *Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dalam Perspektif Politik Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Asrul. (2019). Al-Afghani dan Akar Pembaharuan Sosial-Teologi. *Tasfiah*.
- Bistara, R. (2021). Teologi Modern dan Pan-Islamisme: Menilik Gagasan Pembaharuan Islam Jamaluddin al-Afghani. *Jurnal FiTUA*.
- Fauzi, M. (2017). Tokoh-tokoh pembaharu Pendidikan di Mesir. *Jurnal Tarbiyah*, 393.
- Haedar, N. (2016). *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Pascasarjana UGM: Disertasi Sekolah.
- Khalik, A. t. (2007). *Gelombang Reformasi Pemikiran dalam Islam*, ed. Revisi. Bandar Lampung: PD Hidayat.
- Maryam. (2015). Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani (Respon terhadap Masa Modern dan Kejumudan Dunia Islam). *Jurnal Politik Profetik*.
- Maryam, M. (2014). Pemikiran Politik Jamaluddin Al Afghani: Respon terhadap Masa Modern dan Kejumudan dunia Islam. *Jurnal Politik Profetik*, 12.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasbi, I. (2019). Jamaluddin Al-Afghani (Pan-Islamisme dan Ide Lainnya). *Jurnal Diskursus Islam*.
- Noorthaibah. (2015). Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani: Studi Kalam tentang Taqdir. *Jurnal Fenomena*, 261.
- Nurtina, S. (2019). The Dynamic of Applying Panislamism as a New Politic Concept. *Islamic World and Politic*.
- Ristu Hasriadi Khoo, (2008). Makalah Jamaludin Al-Afghany: Penentang Imperialisme Barat, Pekanbaru
- Sadzali, M. (1993). *Islam Dan Tatanegara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sakinah. (2013). *Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam Mewujudkan Pan Islamisme*. Makassar: UIN Alauddin.
- Sjadzali, M. (1995). *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmalia, D. (2019). Kiprah dan Kontribusi jamaluddin Al-Afghani dalam Pemikiran Modern Islam. *Tajdid*.

-
- Sulaiman, K. J. (2017). Tokoh Pemikiran dan Aktifitas Politiknyadi Dunia Islam Modern. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 10.
- Taufik, A. H. (2015). *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Moderisme Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Qadir, Abdul, (2015). Jejak Langkah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
- Zain, A. M. (2015). Pemikiran Politik Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Mengenai Konsep Pembinaan Peradaban Ummah dan Respons Masyarakat Terhadapnya. *Jurnal Pengajian Umum*.